GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 188.341/Kep.194-Huk/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 188.341/Kep.309-Huk/2021 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2022

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib dalam penyusunan Peraturan Gubernur, terdapat rancangan Peraturan Gubernur yang belum tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2022, agar dapat difasililitasi ke Kementerian Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.341/Kep.309-Huk/2021 tentang Program Pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor Nomor 188.341/Kep.309-Huk/2021 tentang Program Pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.341/Kep.168-Huk/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Banten Nomor Nomor 188.341/Kep.309-Huk/2022 tentang Program Pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2022;

2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Regulasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.341/Kep.309-Huk/2022 tentang Program Pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.341/Kep.168-Huk/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Banten Nomor Nomor 188.341/Kep.309-Huk/2022 tentang Program Pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2022, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Agustus 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 188.341/Kep.194-Huk/2022
Tanggal : 3 Agustus 2022

DAFTAR NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR USULAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	TARGET PENETAPAN
1.	Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Banten	DISTANIAN	Januari
2.	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BKD	Januari
3.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	BKD	Januari
4.	Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2022	BPKAD	Januari
5.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040	DISPERINDAG	Februari
6.	Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026	BAPPEDA	Maret
7.	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten	Biro Organisasi dan RB	Maret
8.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	BAPPEDA	Maret

9.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Biro Organisasi dan RB	Maret
10.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	Biro Organisasi dan RB	April
11.	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2022	BAPENDA	April
12.	Dihapus	-	-
13.	Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas pada Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan RB	Juni
14.	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	BPKAD	Juni
15.	Satuan Harga Barang/Jasa (SHBJ) Tahun 2023	BIRO EKBANG	Juni
16.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023	BAPPEDA	Juni
17.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	BAPPEDA	Juni
18.	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	Biro Organisasi dan RB	Juli
19.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	BPKAD	Agustus
20.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	SETWAN DPRD	Agustus

21.	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Agustus
22.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022	BAPPEDA	Agustus
23.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	BAPPEDA	Agustus
24.	Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	BPKAD	September
25.	Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah	BAPENDA	September
26.	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	BAPENDA	September
27.	Standar Kompetensi Jabatan	Biro Organisasi dan RB	September
28.	Tata Naskah Dinas	Biro Organisasi dan RB	Oktober
29.	Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2023	BIRO EKBANG	Oktober
30.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BPKAD	Oktober
31.	Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama, Penyerahan Kedua, dan seterusnya dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	BAPENDA	Oktober

32.	Dihapus	-	-
33.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Desember
34.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Desember
35.	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Desember
36.	Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Kepada Penjabat Gubernur	Biro Umum	Juni
37.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan	BAPPEDA	Juni
38.	Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Metavers	Dinas Pendidikan	Juli
39.	Pedoman Perencanaan Pembentukan Peraturan Gubernur	Biro Hukum	November
40.	Pedoman Penyelesaian Sengketa Konsumen	Dinas Perindag	Juni

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR